

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

Perampingan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman mengacu kepada analisis beban kerja, analisis jabatan, peraturan pemerintah dan peraturan dalam negeri. Indikator dalam pengelompokan kembali tupoksi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu visi misi yang jelas, pelebagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efektif dan efisien berdasarkan kedudukan dan tupoksi Kabupaten Sleman.

Fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman memiliki 3 klasifikasi tupoksi yaitu Perizinan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi. Pasca restrukturisasi menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman hanya memiliki fungsi monitoring

dan evaluasi. Sub unit organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dipindahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpatu satu pintu Kab. Sleman.

Perubahan Struktur ini berdampak kepada kinerja dari Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Dampak tersebut adalah semakin maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Dua kecamatan di Kabupaten yang memiliki alih fungsi lahan tertinggi di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Gamping dan Kecamatan Sleman. Di Kecamatan Sleman, terjadi penambahan bangunan yakni dari 450 menjadi 841 unit bangunan. Dampak lain adalah kekurangan SDM di Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. KPPD Kabupaten Sleman hanya mampu mengawasi 40 desa dari 86 desa di Kabupaten Sleman. Dampak lain juga adalah sering terjadinya miss komunikasi antar Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dengan BPMPTT selaku badan yang berwenang memberikan izin alih pertanahan terkait pemberian perizinan pertanahan di Kabupaten Sleman.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Oeganisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur organisasi, sebagai berikut:

a. Faktor sumber daya manusia

Berdasarkan jumlah dan beban kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah masih kekurangan sekitar 6 orang pegawai untuk mencukupi kebutuhan pegawai dibandingkan beban tugas yang diembannya. Dari saat itu yang berjumlah 43 orang pegawai, menurut anjab dan ABK dibutuhkan sebanyak 49 orang pegawai atau kekurangan 6 pegawai. Hal ini menunjukkan adanya patologi organisasi berupa overload beban kerja di tubuh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.

b. Faktor Anggaran

Faktor anggaran bukan merupakan faktor utama pendorong restrukturisasi. Akan tetapi adanya semangat pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk mengefektif dan mengefisienkan anggaran belanja SKPD. Diharapkannya, anggaran ini bisa dialihkan ke keperluan lain yang lebih produktif untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

c. Faktor Kehendak Kepala Daerah

Latar belakang utama dalam proses restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan yang ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Sleman.

d. Faktor Perubahan Kebijakan dari Pemerintah Daerah

Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan penataan organisasi pada tahun 2014 ini juga, didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari hasil penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Dalam proses perumusan kebijakan terutama penataan struktur organisasi, Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat untuk dimintai pendapat agar hasil kebijakan pemerintah ini dapat sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi kebijakan yang berorientasi kepada pelayanan publik.

2. Pasca diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah diharapkan Pemerintah Kab.Sleman dapat bekerja optimal, efektif, efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Walaupun secara administratif Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah diturunkan status kelembagaannya, diharapkan restruktursasi organisasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan.
4. Kantor Pengendalian Pertanahan harus bisa memanfaatkan fungsi pengawasan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman, dikarenakan Sleman merupakan daerah resapan air di DIY.
5. Sleman merupakan daerah resapan air di DIY.

## Daftar Pustaka

- Ahdiyah, Marita. 2014. *Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Aneta, Yanti. 2014. *Restrukturisasi Organisasi Dalam Meningkatkan pelayanan Publik Di Pt. Pln (Persero) Area Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungi, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT Rajo Gafindo Persaja.
- Dungga, Weni Almoravid. 2010. *Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41/2007*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Farid, Firmansah & Muhammad Al Musadieq. 2015. *Gambaran Restrukturisasi Organisasi (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Malang tentang Bentuk, Jenis, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat Restrukturisasi dan Desain Struktur Organisasi)*, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 1 No. 2. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Gie, Kwik Kwian. 2014. *Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan*.
- Hadiyanti, Rini. 2013. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda*, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 3. [ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id)
- Hanitijo, Rony. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis
- Jati, Dharma Inu. 2014. *Restrukturisasi Pelayanan Perizinan tahun 2009-2014 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman)*. *Skripsi*. Fisipol UMY
- Kuspriatni, Lista. 2014. *Teori Organisasi*. Universitas Gunadarma: [lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/.../Studi+Tentang+Organisasi.pdf](http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/.../Studi+Tentang+Organisasi.pdf)
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lassen, Vivi. 1997. *In Seacrh Result, Performance Management Practices in Norway, Public Management Service, OECD*.

- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Bandung: Nusa Media
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Negoro, Bayu Retno. 2016. *Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014)*. Yogyakarta: Fisipol UMY
- Osborne, David & Ted Gaebler. 2000. *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government) Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo
- Primasari, Andin Niantima. 2011. *Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan*. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas
- Putra, Prayogi Ayudia. 2015. *Analisis Kelembagaan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fisipol UMY
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surya, Rendra. 2013. *Analisis Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Studi Pada BKD Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi. Fisipol UMY
- Susanto, Edi Madio & Steven Leonardo. 2013. *Restrukturisasi Organisasi Di Pt Samudra Alam Raya Surabaya, Agora Vol. 1, No. 3 (2013)*. Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju
- Winarno, Budi. 2004. *Implementasi Konsep "Reinventing Government" Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Diponegoro: [eprints.undip.ac.id/984/1/Artikel\\_Budi\\_Winarno\\_edit.pdf](http://eprints.undip.ac.id/984/1/Artikel_Budi_Winarno_edit.pdf)

Peraturan-Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Website Resmi Terkait

<http://www.slemankab.go.id/>

<http://kendalitanah.slemankab.go.id/>

<http://kppd.slemankab.go.id/>

<http://www.bkd.slemankab.go.id/>